

Analysis of E-Procurement Problems in LPSE in the Field of Procurement of Goods and Services in Binjai City

Analisis Masalah E-Procurement dalam LPSE pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Binjai

Agiat Mutiara Rengganis¹⁾; Andri Soemitra²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ agiutmutiaram@gmail.com; ¹⁾ andrisoemitra@uinsu.ac.id

How to Cite :

Rengganis, A. M., Soemitra, A. (2022). Analysis of E-Procurement Problems in LPSE in the Field of Procurement of Goods and Services in Binjai City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [17 Mei 2022]

Accepted [3 Juni 2022]

KEYWORDS

LPSE, E-Procurement,

BLPBJ Binjai City

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui masalah e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif, untuk mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Binjai sudah memulai menerapkan namun masih dalam kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian anggota atau pegawai yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai minimal telah memiliki sertifikasi pelatihan khusus, sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan LPSE di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan beberapa pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu seperti Komputer.

ABSTRACT

This study aims to determine the problem of e-procurement in the procurement of goods and services in the Procurement Services Section of the Regional Secretariat of Binjai City. The type of research used is qualitative research. The data analysis technique uses data collection steps, data reduction, data presentation, qualitative data verification, to draw conclusions. The results of the study show that the Procurement Services Section of the Regional Secretariat of the City of Binjai has started to implement but is still in the minimal category in its implementation, it is known that only some members or employees in the Department of Procurement of Goods and Services in the City of Binjai have at least had special training certifications, as SIM form to be able to take part in running the LPSE in Binjai City itself, coupled with non-civil servant employees and several contract employees who apparently lack expertise in science such as computers.

PENDAHULUAN

Bidang pengadaan barang maupun jasa semakin menunjukkan kemajuan dan pengembangan seiring dengan transformasi teknologi yang kian cepat pada masa ini. Pemanfaatan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi masa kini untuk menciptakan keterbukaan,

transparansi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Adapun kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi dibidang informasi dan komunikasi lebih dikenal dengan sebutan E-Procurement. Adapun negara yang telah melaksanakan E-Procurement adalah negara tetangga yakni malaysia dan beberapa negara lainnya, tepatnya pada tahun 1999.

Quangdung dkk (2011) menyebutkan bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 80 thn 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan dari e-Procurement semakin berkembang pesat di negara Indonesia dengan harapan e-Procurement dapat mewujudkan munculnya sifat keterbukaan, transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam sebuah Good Governanc. Pelaksanaan e-Procurement diberbagai negara pada umumnya berjalan dengan berbagai masalah didalamnya. Permasalahan e-Procurement yang kerap terjadi di berbagai negara-negara berkembang berkaitan dengan permasalahan dibidang management, bidang pengorganisasian, bidang teknologi dan bidang lingkungan.

LANDASAN TEORI

McCue & Roman (2012) mengemukakan bahwa di AS dan Kanada pelaksanaan dari e-Procurement menunjukkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang pada umumnya terjadi seperti adanya ketidaksesuaian platform dari sebuah software pada e-Procurement. Tidak berhenti disitu, berbagai permasalahan lain yang terjadi yaitu seperti terjadinya resistensi dalam pengorganisasian penyelenggaraan e-Procurement serta yang paing menjadi hambatan utama dalam peaksanaan e-Procurement yaitu terkait nilai profesionalisme dari sebuah sistem e-Procurement sebagai wujud sebuah profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa atau kerap kali disebut e-Procurement, di Indonesia dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu tepatnya atas dasar Undang-Undang yang mengaturnya dan pelaksanaannya serta pengembangannya dilakukan dengan menunjuk para pakar profesional pada bidangnya yang memiliki kapasitas yang luar biasa.

Adapun pelaksanaan e-Procurement di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa hal yang melatarbelakanginya yaitu belum terpenuhinya syarat SDM, persyaratan pemenuhan teknis dan hukum yang berlaku (Dirgantara, 2009).

Adapun pelaksanaan e-Procurement di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Binjai mengalami berbagai hambatan dalam proses penyelenggaraannya serta memakan waktu yang cukup lama khususnya dalam menetapkan pemenang yang disepakati sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Adapun kendala yang umum sekali dihadapi oleh Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Binjai adalah belum adanya peraturan yang mengatur e-Procurement, secara komperhensif, kurangnya SDM dan infrastruktur yang kurang memadai, jaringan internet yang terkadang tidak stabil.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah e-procurement dalam Ipse pada bidang pengadaan barang dan jasa di sekretariat daerah Kota Binjai.

Berdasarkan penelitian Purwanto (2005) menyebutkan bahwa SDM jika dinilai dari sudut perekonomian adalah poin penting yang mampu menjalankan semua teknologi canggih yang ada sekarang dan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengendalian teknologi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dala penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif menggunakan Human Instrumen. Sugiono (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada umumnya melihat realita sosial sebagai satu kesatuan yang sangat utuh, berkaitan satu sama lain serta terdapat hubungan yang bersifat interaktif didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang cukup luas agar mampu menanyakan, melakukan analisis serta mengambil dan melakukan konstruksi terhadap sebuah

kejadian sosial yang ada. Adapun penelitian ini menggunakan studi kasus di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Binjai. Studi kasus ini diharapkan menjadi catatan tersendiri dalam pengembangan masalah yang terjadi di Kota Binjai dan kota lainnya.

Pencarian data dengan wawancara, observasi, dokumen. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang didasari atas sebuah filsafat postpositivisme dan pada umumnya dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dinilai alami dan peneliti berperan besar dalam menentukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan (Sugiyono, 2016).

Adapun tujuan dari penerapan metode triangulasi lebih kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman dari seorang peneliti terhadap temuan-temuan yang didapat selama penelitian (Sugiyono, 2016). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber dimana berbagai data akan didapatkan dari banyak sumber yang bersifat heterogen serta kebenaran data didapatkan berdasarkan konsistensi jawaban dari banyak sumber tersebut (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SDM adalah hal paling utama dan sangat penting dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dari sebuah kegiatan menjalankan program. Pencapaian program yang dilakukan juga berdampak baik terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan. Adapun penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (Suratman, 2017).

Pada proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Sekretariat Daerah Kota Binjai terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pelaksanaan LPSE, indikatornya diantaranya komunikasi, sumber daya maupun struktur birokrasi. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Binjai sudah memulai menerapkan namun masih dalam kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian anggota atau pegawai yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai minimal telah memiliki sertifikasi pelatihan khusus, sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan LPSE di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan beberapa pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu seperti Komputer.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Binjai terus melakukan berbagai tindakan yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan umum dengan disposisi sebagai indikatornya yang di realisasikan melalui pelaksanaan layanan pengadaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem e- procurement.

Berdasarkan pendapat Edwards III dalam Suratman (2017) menyebutkan bahwa disposisi mengutamakan kualitas dari sebuah karakter. Adapun maksud dari kualitas karakter disini yakni suatu kondisi yang menunjukkan sikap siap, dan dalam hal ini peneliti melihat langsung staf BLPBJ Kota Binjai melakukan persiapan melalui pembekalan serta pemberian sertifikat sebagai bukti mengikuti pembekalan tersebut. Adapun pelaksanaan sebuah kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pembelajaran demi mewujudkan terciptanya kemampuan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu serta menunjukkan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Hawlett dalam Suratman (2017) yang menyatakan pengeimplementasian yang disebut sebagai suatu proses pembelajaran. Adapun proses tersebut dimulai dari diadakannya pembekalan maupun pelatihan sebagai bentuk sebuah profesionalitas bekerja di BLPBJ Kota Binjai dengan harapan bahwa para pegawai yang bekerja dalam instansi ini khususnya dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai memiliki ilmu yang mumpuni. Adapun proses penyiapan SDM yang sangat memiliki kualitas yang baik sudah dimulai dari proses perekrutan yang dilakukan pihak BLPBJ Kota Binjai terhadap para pegawai tidak tetap dan para anggota POKJA. Adapun bidang ilmu yang umum diperlukan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Binjai yaitu terkait bidang teknologi dan pengadaan.

Pendapat O'Brien & Marakas (2006) menyebutkan bahwa terdapat 5 sumber paling penting dari sebuah sistem informasi yakni adanya jaringan, adanya data, adanya software, adanya hardware serta adanya manusia. Dalam penelitian Sumadilaga & Pudjijono (2011) menyebutkan bahwa kelompok kerja dibidang pengadaan dan kelompok kerja dibidang penyedia jasa merupakan 2 jenis Sumber Daya Manusia yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan e-Procurement .

Adapun kekurangan Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang sering kali menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan e-Government di Kota Binjai. Penelitian Mujiono (2008) menyebutkan bahwa banyak pegawai di bidang pengadaan barang jasa belum memiliki kemampuan yang cukup baik khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan (88,65%), dengan akumulasi lulus 189 peserta (11,35%), lulus L2 164 peserta (9,85%) dan Lulus L4 25 peserta (1,5%).

Pada penelitian ini didapati hasil bahwa Sumber Daya Manusia yang melakukan dan menjalankan kegiatan LPSE di bagian pengadaan barang dan jasa tidak memahami secara keseluruhan tupoksi yang harus dijaankan. Adapun beberapa penyebabnya yakni dikarenakan e-Procurement kurang disosialisasikan serta tidak diadakannya pelatihan maupun pembekalan e-Procurement. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Sumadilaga & Pudjijono (2011) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa Poin penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan e-Procurement adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan dari pihak pemerintah, kelompok kerja dan para penyedia jasa.

Permasalahan sumber daya manusia ini juga sejalan dengan penelitian Soniawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa peran dari para pelaku dibidang Pengadaan Barang/jasa erat kaitannya dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Maka hal ini menunjukkan ketidak siapan para SDM dalam menjalankan Pengadaan Barang/jasa.

Adapun berdasarkan penelitian Sari dkk (2018) menyatakan kualitas sumber daya manusia dalam dapat ditingkatkan melalui:

1. Evaluasi
2. Mendirikan fasilitas yang sesuai kebutuhan
3. Mengadakan pelatihan

Faktor internal dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya kinerja di bagian layanan Pengadaan, adapun faktor internal tersebut yaitu faktor dari struktur organisasi, faktor dari SDM, dan faktor finansial. Ketiga faktor internal organisasi tersebut mempengaruhi kinerja Bagian Layanan Pengadaan.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi hambatan di Pemerintah Kota Binjai dalam LPSE yang dihadapi selama ini adalah berkaitan dengan teknologi, hal ini ditunjukkan dengan sulitnya sistem LPSE diakses saat banyak orang yang sedang mengaksesnya.

Maka solusi yang dapat dilakukan untuk menyiasati hal tersebut yaitu dengan mengakses LPSE tidak pada jam kerja dan biasanya operator akan menginformasikan kepada para user untuk menerapkan saran tersebut sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Komunikasi juga berperan penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dengan kesepahaman para pihak yang turut bekerja maka kesalahpahaman dapat dihindari dan mewujudkan sebuah hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan. Komunikasi sendiri berguna untuk memunculkan koordinasi yang baik antar relasi yang bekerja.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Hogwood dan Lewis dalam Nugroho (2014) yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan publik diperlukan peran komunikasi. Hal ini mengartikan bahwa peran komunikasi sangat mempengaruhi hasil dan tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Binjai sudah menggunakan

teknologi dengan baik dalam menerapkan bentuk komunikasi online yang tentunya akan memberi informasi kepada para pengguna jasa dengan efisien dan tentunya tidak menyita banyak waktu.

Adapun pendapat Tachjan dalam Suratman (2017) dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan perlu memoerhitungkan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Pemanfaatan pengembangan komunikasi online oleh LPSE Kota Binjai memberikan dampak yang baik sehingga menghindari berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.

Jika didasarkan oleh teori Elmore, Lipsky, Hjren dan O'Poter dalam Nugroho (2014) makan Layanana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai sudah memenuhi syarat nerkaitan dengan tujuan kebijakannya. Serta mampu menerapkan kinerja yang bersifat efektif dan efisien.

Adanya swakelola dan ruang yang lebih mudah yang diberikan pada masyarakat oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kota Binjai tentunya berdampak baik terhadap pengimplementasian layanan pengadaan secara elektronik.

Hadirnya layanan elektronik oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Binjai tentunya akan meningkatkan perekonomian Kota Binjai dnegan berbagai kemudahan yang sudah diterapkan dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini sejalan dengan teori David L. Weimer dalam Subarsono (2010) yang menunjukkan adanya upaya mengutamakan peran lingkungan kerja dari pada penentuan logika kebijakan yang akan dilakukan.

Hasil dari penelitian inis ecara keseluruhan sejalan dengan penelitian Ahmad (2020) yang menunjukkan terdapat lima indikator yang menentukan keberhasilan LPSE yakni: SDM, komunikasi, tujuan, lingkungan dan bentuk patuh para implementor.

Penelitian lainnya yang juga sejalan yaitu penelitian Prihastuti (2014) yang menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan eProcurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua diantaranya adalah SDM, teknologi dan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti dapat disimpulkan berdasarkan analisis masalah e-procurement dalam LPSE pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat daerah Kota Binjai sebagai berikut:

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kota Binjai sudah memulai menerapkan namun masih dalam kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian anggota atau pegawai yang ada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai minimal telah memiliki sertifikasi pelatihan khusus, sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan LPSE di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan bebrapa pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu seperti Komputer.

Operator atau pekerja (SDM) belum memahami cara menjalankan LPSE di bagian pengadaan barang/jasa karena minim sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan LPSE terlebih dalam pelaksanaan e-Procurement. Kemudian kurang adanya bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan LPSE dalam pengadaan barang/jasa.

Selain permasalahan SDM, Teknologi juga menjadi masalah. Dalam Permasalahan di bidang teknologi adapun yang dihadapi di Pemerintah Kota Binjai dalam LPSE yang terjadi selama ini yaitu, apabila banyak yang menggunakan atau mengakses LPSE sehingga untuk mengakses sistem tersebut melambat atau terkadang sistem tersebut eror.

Konsep pengadaan secara non tender dilakukan guna mengadakan barang/jasa dengan waktu ayng relatif lebih cepat tanpa adanya proses pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Hal ini tentunya akan mempermudah pemerintah Daerah Kota Binjai guna mengadakan berbagai keperluan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan di Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2020. Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dirgantara, P. (2009). Rekomendasi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Hambatan Penyedia Jasa Konsultansi Secara Elektronik (Eprocurement). Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Farida. N. 2013. Kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*. 2(1).
- J. A. O'Brien And G.M. Marakas. 2011. *Management Information System*, Tenth Edit. New York: Mcgraw-Hill Irwin.
- Luknanto, D. (2004). Modul Kebijakan Dan Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa. Yogyakarta.
- Milles, M.B Dan A. Michael Hubberman. 2009. *Analiis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mccue, C., & Roman, V. A. (2012). E-Procurement : Myth Or Reality? *Journal Of Public Procurement*, 212-238.
- Mujiono. (2008, Mei 06). Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Retrieved November 10, 2014, From Pupapua.Net: [Http://Www.Pupapua.Net/Pu/Baca/Berita/2012/07/26/52/EPROC.DAN.SDM.PENGADAAN.PENGAADAAN.BARANG.JASA](http://www.pupapua.net/pu/baca/berita/2012/07/26/52/EPROC.DAN.SDM.PENGADAAN.PENGAADAAN.BARANG.JASA)
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihastuti. N. E. 2014. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Tesis. Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Purwanto. 2005. ARTI DAN PERANAN SUMBERDAYA MANUSIA. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. 2 (2).
- Quangdung, T., Huang, D., Liu, B., & Ekram, H. M. (2011). A Construction Enterprise's Readiness Level In Implementing E-Procurement : A System Engineering Model. *System Engineering Procedia*, 131-141.
- Sari, N. 2018. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. 18 (2).
- Soniawan, T., Musyafik, M. N. 2020. Manajemen Sdm Pada Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar (Ditinjau Dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia) *Jurnal Ilmu Manajemen*. 9 (2).
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumadilaga, D. H., & Pudjijono, A. (2011). Kendala, Keberhasilan Dan Tantangan Dalam Sembilan Tahun Pelaksanaan E-Procurement Di Kementerian PU Dalam Mencapai Good Governance. *Konferensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Indonesia*. Bandung, Indonesia.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluas Kebijakan Publik*. Surabaya: CAPIYA Publishing.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningsih. S. E., Kusuma. W., Martoyo. 2013. Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (Bp2amkb) Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.